

# KEMISKINAN dan KESEJAHTERAAN

Idzaa Marfuah  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

## Abstract

*Poverty is a vicious circle problem, which is very hard to separate its causes and effects. Vulnerable economic foundation, bureaucratic corrupted, and undemocratic government has caused economic crisis become an apprehensive moral crisis. To overcome this problem, sustainable integration of the society and government will have to be exist, and finally the nation wealth will be achieved.*

## PENDAHULUAN

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 menyebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.

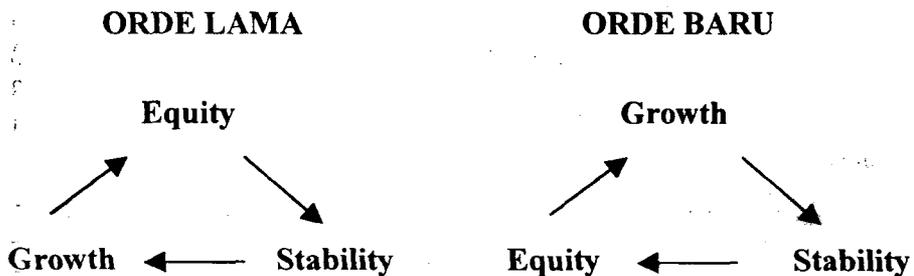
Fundamental ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan pemerintahan yang sangat birokratis dan cenderung korup serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut pada krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif tertinggal. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah sejalan dengan arah dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Nota Keuangan tahun 1999 - 2000).

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam berbagai kebijakan dan program keuangan daerah telah dilaksanakan baik oleh masing-masing daerah maupun melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta. Hasil nyata dari program-program tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik Dati I maupun Dati II. Penerimaan Dati I seluruh Indonesia dalam T.A. 1993-1994 masih berjumlah Rp. 8.382,3 Milyar naik menjadi Rp.12.876,1 Milyar dalam T.A. 1997-1998 atau naik rata-rata per tahun 11,3 %.

### MODEL PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN

Paradigma pembangunan di Indonesia dari periode ke periode mempunyai model yang berbeda-beda. Model yang ada pada orde lama dan orde baru adalah sebagai berikut:



Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kelemahan tergantung pada kondisi atau situasi yang ada pada negara tersebut saat itu. Dan tampaknya orde reformasi ini mengacu pada model orde

lama di mana stabilitas memegang peranan utama. Setelah stabilitas nasional tercapai baru akan dilakukan pembangunan dengan orientasi pertumbuhan.

Penerapan Kebijakan ekonomi yang sangat berorientasi pada pertumbuhan Gross National Product dan liberalisasi ekonomi (perdagangan bebas, pemasukan modal asing dan bantuan luar negeri) pada negara berkembang yang struktur ekonominya dualistik menurut Sritua Arief, mempunyai dua elemen pokok yaitu :

- (1) Ekspansi ekonomi harus terjadi melalui proses industrialisasi dan pengembangan sektor modern
- (2) Proses ekspansi ekonomi dibiayai dengan redistribusi resources di kalangan kapitalis dan bantuan luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing dan pinjaman luar negeri (Arief, 1979).

Ketimpangan penguasaan sumber daya yang diideologikan lewat The Law of Comparative Advantage kemudian memperoleh dukungannya dengan adanya model pembangunan yang menerapkan 'Trickle Down Effect', efek menetes ke bawah, yang dalam perjalanannya ternyata sangat sulit untuk diwujudkan. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial yang kemudian muncul membarangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Konglomerasi dan sistem bapak angkat sulit untuk dilaksanakan. Ketimpangan ini terutama ditunjukkan oleh masyarakat miskin dan bagaimana kemiskinan itu terpola.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu menurunkan jumlah masyarakat miskin secara pesat dalam 20 tahun terakhir, walau kemudian hal ini menjadi berantakan dengan adanya krisis yang memporakporandakan sendi-sendi perekonomian nasional. Berikut ini tabel kemiskinan di beberapa negara Asean ditambah dengan China antara tahun 1975-1995.

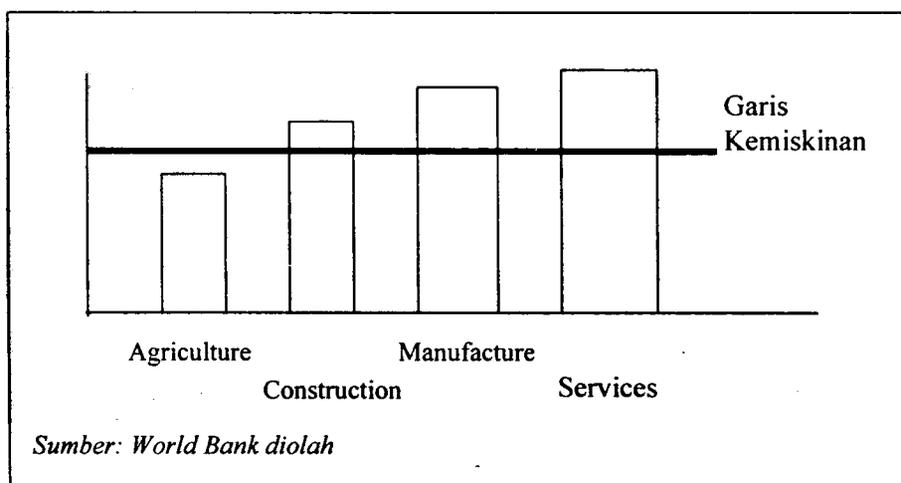
Dari data tersebut terlihat bagaimana Indonesia mampu secara cepat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 87,2 juta jiwa pada tahun 1975 menjadi 21,9 pada tahun 1995.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Negara Asean dan China Antara 1975 - 1995**

Negara	Jumlah Penduduk Miskin ( dalam juta )		
	1975	1985	1995
Malaysia	2,1	1,7	0,9
Thailand	3,4	5,1	< 0,5
Philipina	15,4	17,7	17,6
Indonesia	87,2	52,8	21,9
China	568,9	398,3	269,3

Sumber : World Bank

Namun kemiskinan di Indonesia mempunyai pola yang cukup memprihatinkan karena sebagian besar kemiskinan terletak pada sektor agriculture. Data yang diperoleh dari World Bank menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita dari 4 sektor yaitu agriculture, manufacture, konstruksi dan jasa terhadap garis kemiskinan adalah sebagai berikut :



Pengeluaran yang dilakukan oleh agriculture hampir semuanya berada di bawah garis kemiskinan, sementara 3 sektor lainnya masih

berada di atas garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin pada agriculture benar-benar pada kondisi di bawah garis kemiskinan.

Dalam disertasi *Analysis of Regional Growth And Disparity : The Impact Analysis of The Inpres Project on Indonesian Development*, Ardani menyatakan bahwa ketimpangan regional merupakan konsekuensi dari pembangunan di mana pembangunan regional tidak sama disebabkan karena kekurangan sumber daya dan juga adanya tendensi untuk memulai investasi baru pada daerah yang dianggap akan potensial memberikan profit. Di samping itu, pembangunan ekonomi mendorong terjadinya konsentrasi spasial, polarisasi dan ketimpangan regional.

### **UKURAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Ukuran utama kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Padahal sebenarnya terdapat ukuran yang lebih baik untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Konsep standart hidup merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yang menekankan pada pengeluaran agregat dari seluruh konsumsi barang dan jasa yang dinilai dalam harga. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa yang dilihat adalah oportunitas rumah tangga dalam berkonsumsi, jadi bukan merupakan konsumsi aktual. Indikator kesejahteraan yang lain yang digunakan adalah tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, tingkat melek huruf dan juga pendidikan. Menurut Cluster dalam World Bank (1999), Indikator sosial dibagi menjadi 3 kategori (lihat tabel 2).

**Tabel 2. Indikator Social Versi World Bank (1999):**

<b>Cluster 1 Kesehatan, Pendidikan &amp; Jaminan makanan</b>	<b>Cluster 2 Tenaga Kerja, Pendapatan</b>	<b>Cluster 3 Masyarakat</b>
Tingkat kelahiran	Kemiskinan	Trend pada level kekerasan
Berat badan lahir rendah	Pengangguran	Inisiatif baru dalam penyelesaian pertikaian
Antropometri	Tenaga kerja sektor swasta	Lingkup asosiasi media
Tingkat Vaksinasi	Benefit pengangguran	Skema tabungan masyarakat
Pendaftaran sekolah	Tingkat aktivitas	Regulasi lingkungan pada organisasi masyarakat sipil
Putus sekolah	Upah riil	Lingkup dan spread asosiasi wanita
Tingkat kematian bayi	Transfers	Keanekaragaman institusi masyarakat sipil
Tingkat kematian anak-anak	Asuransi sosial	Jalur vertikal dan horisontal pada organisasi masyarakat sipil
Akses untuk air dan sanitasi	Pensiun	Pendidikan informal dan program training
Akses untuk servis kesehatan dasar	Migrasi	Program kredit kepemilikan rumah
		Forum untuk akses ke pemerintahan/ departemen
		Forum untuk akses ke struktur pemerintahan lokal

Sumber : World Bank, 1999

Kategori-kategori tersebut di atas merupakan sistem monitor yang akan menunjukkan adanya perubahan di dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, kematian bayi dan juga indikator yang lebih kua-

litatif seperti pemerintahan dan institusinya. Dari ketiga kategori tersebut bisa kita ternyata mewakili sektor kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan. Untuk kategori yang ketiga kita akan kesulitan dalam mencari tolok ukurnya. Untuk ukuran yang pertama biasa dipakai Indikator pembangunan manusia yang terdiri atas Angka harapan hidup, tingkat melek huruf dan tingkat kematian bayi. Data yang diperoleh dari World Bank, menunjukkan pada hampir semua negara terjadi peningkatan angka harapan hidup yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia di mana angka harapan hidup yang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Di mana menurut laporan Biro Pusat Statistik pada tahun 1980 angka harapan hidup untuk wanita adalah 54 tahun sementara pria sebesar 50,9 tahun yang kemudian meningkat menjadi 59,1 dan 52,7 pada tahun 1985. Angka yang cukup fantastis muncul satu dasa warsa kemudian yaitu menjadi 66 tahun pada tahun 1996. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa sudah terjadi pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

## **KEMISKINAN, INSTITUSI DAN LINGKUNGAN**

Kemiskinan, Institusi dan lingkungan adalah 3 hal yang sangat berkaitan erat dan sulit untuk dipisahkan. Di mana kemiskinan & kegagalan institusi dalam mengelola sering menjadi kambing hitam dalam kerusakan lingkungan. Hal ini akan kita bahas satu persatu.

Kegagalan pasar adalah hal yang menyolok di dalam interaksi yang tersembunyi. Sebagai contoh, penurunan hutan akan menyebabkan kerusakan pada aliran air bawah tanah. Hukum adat/kebiasaan di beberapa negara berkembang kenyataannya menunjukkan adanya hak perusakan lingkungan. Sebagai contoh perusahaan kayu memperoleh kelonggaran untuk mengelola hutan yang berdampak pada kerusakan tanah yang merugikan petani karena adanya potensi untuk terjadi banjir dan tanah longsor. Di Indonesia, kasus kebakaran hutan terbesar di daerah Sumatra dan Kalimantan tahun lalu menunjukkan bagaimana penggundulan hutan yang dilegalkan dengan munculnya HPH ternyata memberikan dampak yang merusak. Dalam hal perusakan hutan, perusahaan besar seharusnya memberikan kompensasi terhadap masyarakat di sekitar hutan dan juga pada negara karena terjadi-

nya deforestation. Di sini eksternalitas timbal balik maupun tidak langsung dari adanya pemanfaatan hutan dan sumber alam yang lain.

Teori alokasi sumber daya modern merupakan bagian besar dalam transformasi teknologi, interaksi ekologi dan preferensi individual. 2 fundamental teori dari ekonomi memperhatikan eksistensi dari alokasi sumber daya yang diperkenalkan oleh Coase yang terkenal dengan teori *Eksternalitas Coase*. Di mana keuntungan yang diperoleh oleh seseorang memberikan kerugian bagi orang lain sehingga seharusnya pihak yang diuntungkan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Dari ulasan tersebut di atas, terdapat 4 hal yang mendorong terjadinya kerusakan lingkungan:

1. Terdapat perbedaan antara citra lingkungan dengan keadaan lingkungan. Perbedaan ini menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan lingkungan.
2. Sering tanda kerusakan lingkungan tidak terekam oleh masyarakat karena masyarakat menjadi terbiasa dan menyesuaikan diri dengan penurunan kualitas lingkungan yang terjadi secara bertahap dalam jangka panjang, sehingga kerusakan baru disadari setelah terlambat seperti proses erosi tanah, pencemaran udara dan air
3. Manusia tidak selalu bertindak rasional sesuai dengan citra lingkungan yang mereka miliki terutama jika manusia harus memenuhi kebutuhan jangka pendek sehari-hari.
4. Adanya sikap manusia terhadap lingkungan yang berubah sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam besar-besaran.

Berkaitan dengan eksploitasi lingkungan, kemiskinan sering dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan karena *keterpaksaannya* menggunakan sumber daya yang berlebihan. Terutama sekali karena 2 hal yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan ketergantungan terhadap sumber daya alam. Namun dari 2 sebab tersebut di atas, alasan kepadatan penduduk menduduki tempat yang paling kuat karena dengan bertambahnya jumlah rumah tangga miskin telah menekan pertanian ke arah tanah marginal yang rentan terhadap kerusakan.

Salah satu korban dari adanya kemiskinan adalah anak-anak, di mana mereka tidak hanya bertindak sebagai konsumen namun juga harus bertindak sebagai produsen. Ini merupakan salah satu motivasi

dari suatu rumah tangga miskin untuk mempunyai anak (Mueller, 1976). Yang dimaksudkan di sini bukan hanya dalam memproduksi barang-barang namun juga untuk mengerjakan pekerjaan yang bersifat implisit seperti membantu pekerjaan rumah tangga. Menurut suatu studi di Himalaya menunjukkan bahwa anak-anak usia 10 - 15 tahun menghabiskan separo dari jamnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut. Di sinilah terdapat perbedaan motivasi mempunyai anak bagi keluarga miskin dan kaya.

Di sisi lain, wanita juga mempunyai peranan penting dalam pekerjaan untuk mencari nafkah terutama dalam keluarga miskin. Wanita selain mengerjakan pekerjaan rumah dengan dibantu oleh anak-anaknya juga menggunakan separo waktunya untuk membantu suami baik sebagai buruh tani maupun sebagai buruh pabrik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nok Idah (1994) terhadap faktor yang mempengaruhi wanita untuk bekerja di luar rumah adalah karena untuk pendapatan keluarga, semakin banyaknya jumlah anak dan juga karena semakin tingginya pendidikan wanita tersebut. Untuk negara yang sedang berkembang faktor yang pertama dan kedua menduduki peringkat yang paling tinggi mempengaruhi seorang wanita terjun ke dunia pekerjaan.

Selain kemiskinan, kegagalan institusi internasional juga menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Semakin berkembangnya industrialisasi di banyak negara di dunia, percobaan-percobaan nuklir yang sangat rawan terhadap radiai dan penggunaan senjata kimia serta biologi pada peperangan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Penebangan hutan untuk kawasan industri maupun untuk pembangunan telah menyebabkan berkurangnya paru-paru dunia. Melihat kenyataan ini maka mulai bermunculan lembaga-lembaga non-pemerintah (Non Government Organization) atau lebih dikenal dengan LSM yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan seperti Green Peace dan WWF. Hasil konferensi lingkungan hidup sedunia yang diselenggarakan di Rio De Jenairo Brasil bagaimanapun masih menempatkan negara berkembang sebagai obyek dari kepentingan negara maju (kaya). Terutama dalam masalah lingkungan hidup, hal ini tidak mengherankan karena selama ini negara yang sedang berkembang berusaha untuk mengejar keteringgalan dari negara maju dalam bidang industri dengan segala cara dan tanpa memperhatikan pentingnya aspek lingkungan. Perdagangan

dan transformasi teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan apabila dilihat bahwa struktur negara berkembang yang lebih banyak mengekspor bahan mentah untuk kemudian menukarnya dengan barang-barang jadi yang tentu saja merangsang negara berkembang terus mengeksploitasi sumber daya alamnya agar mampu memperoleh tambahan devisa yang akan di gunakan untuk berdagang dengan negara maju. Adanya keinginan sekaligus tekanan untuk mengembangkan diri ini menyebabkan negara miskin (berkembang) sering mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan.

Untuk memperbaiki masalah ini maka dilakukan agreement antar negara untuk mau melakukan pelestarian hutan di negara masing-masing.

## **INDONESIA PASCA KRISIS**

Dampak krisis terhadap kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sangat terasa di hampir semua negara. Kenaikan kemiskinan tergantung pada GDP riil. Bank dunia mengestimasi bahwa penurunan GDP sebesar 12% akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar hampir 40%. Namun kemiskinan ini sangat bervariasi pada tiap-tiap daerah tergantung pada sektor apa yang dominan pada daerah tersebut. Rata-rata kemiskinan pada daerah urban seperti Jakarta, diestimasi akan berlipat ganda dari 3,8% pada tahun 1997 menjadi 8,3% pada tahun 1999 atau naik lebih dari 2 kali lipat. Sementara untuk daerah pedesaan yang rata-rata hidup dari pertanian perubahannya hanya sekitar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya krisis ternyata sektor agriculture lebih mampu bertahan terhadap imbas krisis dibandingkan dengan 3 sektor yang lain.

Sebab utama sektor manufacture, construction dan services kurang mampu bertahan adalah karena penurunan dalam GDP akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pengangguran. Ini sangat penting diperhatikan oleh pemerintah karena dampak pengangguran sangat luas terutama bagi kesehatan keluarga dan pendidikan anak. World Bank untuk kasus di Indonesia memprediksi bahwa 2,75 juta pelajar pada tingkatan SD dan SMP akan mengalami drop out sementara 400.000 lulusan SD tidak mampu untuk melanjutkan ke SMP. Kondisi yang sangat mempri-

hatinkan ini mendorong pemerintah untuk melancarkan program beasiswa JPS bagi siswa yang tidak mampu. Ini merupakan salah satu bentuk program rescue dalam rangka pengentasan masyarakat Indonesia dari krisis. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah bantuan tersebut bisa mencapai sasaran yang dikehendaki ?

Terlepas dari semua itu, yang harus dilakukan bangsa Indonesia saat ini adalah bersatu. Mungkin pepatah sapu lidi; Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, harus kembali ditanamkan secara massal kepada segenap lapisan masyarakat di Indonesia.

## **PENUTUP**

Kemiskinan dan kesejahteraan merupakan dua kutub berbeda yang harus saling meniadakan dalam menuju masyarakat madani. Dibutuhkan keterkaitan yang sangat erat antara berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga setiap kebijakan bisa sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan demi terlaksananya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera di bawah lindungan Allah SWT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dasgupta P & Maller, 1991. *The Enviroment and Emerging Development Issue Proceedings of The Annual World Bank Conference on Development Economies.*
- Idah N, 1994. *Faktor yang Mempengaruhi Buruh Wanita di Kabupaten Temanggung*, Penelitian tidak diterbitkan. Surakarta: FE-UNS.
- Lutz, 1993. *Toward Improved Accounting for the Environment.* Washington DC: World Bank
- Pearce D, Barbie E and Markandya, A, 1988. *Sustainable Development and Cost Benefit Analysis.*

Sumarwoto, O., 1992. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press

Sukirno, S., 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Lembaga Penerbit FE-UII

Vyas S., 1992. *Struktur Agraria, Masalah Lingkungan dan Kemiskinan di Pedesaan*.

World Bank, 1999. *Social Development Empirical Evidence*.